



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
WAKIL KETUA DPR RI / BIDANG KORPOLKAM  
MENERIMA  
MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS INDONESIA  
SELASA, 12 NOVEMBER 2019**

Tahun Sidang	:	2019 - 2020
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	-
Jenis Rapat	:	Audiensi
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Selasa/12 November 2019
Waktu	:	10.00 – 12.00 WIB
Tempat	:	Operation Room DPR RI Gedung Nusantara 1
Acara	:	Menerima Audiensi Mahasiswa FISIP UI
Pimpinan Pertemuan	:	DR. Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam)
Sekretaris	:	Danis Maya, SH. Kabag Set Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
Hadir	:	Mahasiswa FISIP UI (50 orang) beserta pendamping

**A. Pendahuluan**

Pada hari Selasa, 12 November 2019 pukul 10.00 WIB Wakil Ketua DPR RI bidang Politik dan Keamanan, Bapak DR. Azis Syamsuddin menerima mahasiswa FISIP UI di Ruang Operation Room DPR RI Gedung Nusantara 1.

**B. Pokok-pokok Pembicaraan**

1. Perwakilan menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami detail persoalan dan mekanisme yang terjadi di DPR-RI. Selama ini, informasi yang diterima masyarakat tentang situasi yang berkembang di DPR-RI didapatkan melalui pemberitaan media. Sayangnya, tidak jarang pemberitaan itu kurang berimbang. Sehingga DPR RI ini terkesan buruk di mata publik.
2. Perwakilan juga meminta penjelasan terkait informasi mengenai mekanisme, proses dan produk perundang-undangan yang dilahirkan di DPR RI.

### C. Penutup

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan secara mendasar fungsi dan kedudukan DPR-RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahwa dalam proses pembuatan undang-undang, ada banyak *variable* yang perlu dipertimbangkan, mulai dari proses lahirnya Rancangan Undang-undang (RUU), proses penyusunan Draft RUU, serta mekanisme dan prosedur pembahasan undang-undang.
2. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan juga sumber pengusul RUU yang berasal dari DPR, Pemerintah, Anggota DPR RI dan dari DPD RI. Adapun proses pembahasan dilakukan bersama-sama antara DPR dengan pemerintah. Setelah disepakati, sebuah RUU akan melalui proses pembahasan yang cukup panjang dan transparan. Bahkan dalam proses tersebut, masyarakat juga dilibatkan untuk memberi masukan.
3. Terkait adanya RUU yang tertunda pengesahannya sudah selayaknya publik melihat semua prosesnya secara menyeluruh dan melakukan penilaian secara objektif. Sebab Undang-undang adalah sebuah produk negara yang bukan hanya menjadi tanggungjawab satu Lembaga negara saja.

**Audiensi ditutup pada pukul 12.00 WIB**

**a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat**

  
**Danis Maya, SH.**  
**197410261999031004**